

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 11 November 2018

CECEP
NIM: 141200340

ABSTRAK

Nama Cecep, NIM: 141200340, Judul Skripsi Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Kepada Penggugat Oleh Pejabat Tata Usaha Negara Analisis terhadap pasal 120 Undang-Undang No. 05 tahun 1986 jo. Undang-Undang no. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN Serang)

Ketentuan pada pasal 120 Undang-Undang No. 05 tahun 1986 jo. Undang-Undang no. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang juga teknis dan tata cara pelaksanaan ganti rugi tersebut di atur Oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tatacara Pelaksanaannya Dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Membatasi pembayaran ganti rugi dalam Peradilan Tata Usaha Negara paling minimal Rp. 250.000.000'- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) maksimal Rp. 5.000.000.000'- (Lima Juta Rupiah) yang menyebabkan kesenjangan dalam Peradilan Tata Usaha Negara karena dalam beberapa kasus yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara mendapati fenomena, kerugian penggugat yang dalam hal ini adalah Sesorang atau Badan Hukum Perdata hanya mendapatkan ganti rugi dari pihak tergugat dalam hal ini adalah Pejabat Tata Usaha Negara paling maksimal lima juta tanpa melihat kerugian penggugat.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu 1. Apa yang menjadi latar belakang dibatasinya ganti rugi Peradilan Tata Usaha Negara dan Bagaimana pelaksanaan dan tata cara ganti rugi yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD).

Tujuan penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui Apa yang menjadi latar belakang dibatasinya ganti rugi Peradilan Tata Usaha Negara dan untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan dan tata cara ganti rugi yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum primer dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim, bahan hukum skunder dari buku-buku teks, termasuk skripsi, tesis, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan wawancara.

Kesimpulan penelitian ini adalah : *Pertama* Ganti rugi yang tercantum pada pasal 120 UU No. 5 Tahun 1986 tersebut, Secara realitas Hakim PTUN tidak membacanya secara Tekstual Normative tetapi membacanya dengan proses Tekstual Realitas artinya bahwa hakim tidak lagi terlalu patuh pada isi secara tekstual dalam pasal tersebut tetapi juga disesuaikan dengan realitas saat ini dengan tujuan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya, artinya pembatasan maksimal Rp. 5.000.000. tidak dilihat lagi karena hakim harus mempertimbangkan total kerugian penggugat. *Kedua* Pembebanan ganti kerugian yang dikeluarkan oleh pejabat pusat dan yang menjadi beban APBN akan di atur lebih spesifik dengan Peraturan Menteri Keuangan yang telah di tetapkan keputusan tersebut menjadi keputusan menteri keuangan nomor 1129/KKM.01/1991 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan pembebanan ganti rugi yang menjadi tanggungan APBD akan di atur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, menurut pemaparan dalam wawancara yang dilakukan di PTUN Serang bahwa Kementerian Dalam Negeri memberikan ruang kepada pejabat TUN yang bersangkutan, artinya tanggung jawab pembuatan teknis tata cara pelaksanaan pengambilan atau pemberian ganti rugi sebagai pelaksanaan dari putusan Peradilan TUN di atur oleh badan yang bersangkutan.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

| | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Nomor : Nota Dinas | Kepada Yth |
| Lamp : Skripsi | Bapak Dekan Fak. Syari'ah UIN SMH |
| Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah | Banten |
| a.n. Cecep | Di – |
| NIM : 141200340 | Serang |

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara **Cecep**, NIM: **141200337** yang berjudul **Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Kepada Penggugat Oleh Pejabat Tata Usaha Negara Analisis terhadap pasal 120 Undang-Undang No. 05 tahun 1986 jo. Undang-Undang no. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN Serang)**.

Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 11 November 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. M. Syamsudin, M.Pd.
NIP. 19550307 198003 1 003

Eka Julaiha, M.Ag.
NIP.19003162000032003

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP
PELAKSANAAN GANTI RUGI KEPADA
PENGGUGAT OLEH PEJABAT TATA USAHA
NEGARA ANALISIS TERHADAP PASAL 120
UNDANG-UNDANG NO. 05 TAHUN 1986 JO.
UNDANG-UNDANG NO. 51 TAHUN 2009 TENTANG
PERADILAN
TATA USAHA NEGARA(PTUN Serang).**

Oleh:

CECEP
NIM: 141200340

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. M. Svamsudin, M.Pd.
NIP. 19550307 198003 1 003

Eka Julaiha, M.Ag.
NIP. 19003162000032003

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 195911199103 1 003

Dr.H. Muhammad Ishom,M.A
NIP.19760623 200604 1 002

PENGESAHAN

Skripsi a.n.**Cecep**, NIM: **141200340** yang Berjudul **Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Kepada Penggugat Oleh Pejabat Tata Usaha Negara Analisis Terhadap Pasal 120 Undang-Undang No. 05 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN Serang)**, telah diajukan dalam sidang munaqasah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten Pada tanggal 01 November 2018, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 01 November 2018

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si
NIP. 19800721 200912 1 005

Anggota,

Penguji I

Penguji II

D.r.H.Ahmad Sanusi, M.A.
NIP. 197802252008011009

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.
NIP. 19770816 200501 1 004

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. M. Syamsudin, M.Pd.
NIP. 19550307 198003 1 003

Ekajulaiha, M.Ag.
NIP. 19003162000032003

PERSEMBAHAN

Sebagai wujud rasa syukur kehadiran Illahi Robbi, ananda persembahkan Skripsi ini kepada ayahanda tersayang H. Sara dan ibunda tercinta HJ. Sukah dengan jerih payah dan tetes keringatnya ikhlas telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil serta mendidik dan membimbingku dengan untaian doa dan kasih sayang. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik, serta kakak-kakakku tersayang juga para guru dan sahabat.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.(Q.S. An-nisa :58)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Cecep dilahirkan di kp. Cipaeh Kijaed Desa. Gunung Kaler Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Provnisi Banten pada tanggal 03 April 1993, penulis dilahirkan dari buah cinta pasangan h. Sara danHj. Sukah, penulis merupakan anak ke 4 dari 6 bersaudara.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

1. SDN Cipaeh 2 Kec. Gunung kaler lulus tahun 2007
2. Madrasah Tsanawiyah Mathlab El- Awam Cikande-Serang lulus pada tahun 2010
3. Madrasah Aliyah Mathlab El-Awam Cikande-Serang lulus pada tahun 2013
4. Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanudin Banten 2018

Selama masa perkuliahan penulis pernah aktif di organisasi kampus baik intra maupun extra, diantaranya:

1. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) menjabat sebagai Sekretaris Jendral Tahun (SEKJEN) pada Tahun 2015-2017.
2. Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an (UPTQ) UIN SMH Banten, menjabat sebagai anggota.
3. Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U), menjabat sebagai ketua komisi A bagian legislasi Tahun 2017
4. Himpunan Mahasiswa Jurusan Tata Negara UIN SMH Banten, menjabat sebagai ketua biro PAO tahun 2015
5. Organisasi Santri Mathlab El-Awam (OSMA), menjabat sebagai ketua pada tahun 2012.
6. Forum Silaturahmi Keluarga Alumni Mathlab El-Awam (FOSKAMA) sebagai salah satu pendiri pada tahun 2017.
7. PARALEGAL Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Forum Pemerhati Pembangunan (LKBH FPP) Cilegon.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُدِسْمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat Iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan keselamatan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW pada keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dan motivasi dari semua pihak. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman., MA, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan bergabung di kampus UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.ag., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
3. BapakDr. M Ishom, MA., ketua jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

4. Bapak Dr. H.M. Syamsudin, M.Pd., sebagai pembimbing I dan IbuEka julaeha, M.Ag., sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan sepenuh hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang sangat berharga selama penulis kuliah di UIN “Sultan Maulana Hasanudin” Banten.
6. Bapak K.H Jawahir Abu Bakar, Bapak K.H Ahmad Matin, Ustadz Izzudin, Ustadz Makhrus Djawahir dan keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Daarul Falah Ciloang Serang yang senantiasa mendidik, memotivasi dan do’anya atas penulis.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta terimakasih atas do’a yang tak pernah henti-hentinya panjatkan demi kesuksesan penulis,kakak-kakak ku tercinta yang selalu mendukung untuk kesuksesan penulis.
8. Kawan- kawan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, kepada kawan-kawan Kobong Darul Falah kepada seluruh mahasiswa Hukum Tata Negara angkatan 2014 yang tak dapat disebutkan satu persatu, semoga silaturahmi kita terus terjalin. Saran dan kritik dari para pembaca merupakan sebuah apresiasi

untuk penulis, karena penulis menyadari betul dalam penulisan skripsi ini masih dari kesempurnaan baik dari isi maupun metodologi penulisannya. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

Serang, 11 November 2018

CECEP
NIM:141200340

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------|-----|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PENGAJUAN | ii |
| SURAT PERSETUJUAN DEKAN | iv |
| PENGESAHAN | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| MOTO | vii |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat/ Signifikasi Penelitian | 12 |
| E. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 13 |
| F. Kerangka Pemikiran | 15 |
| G. Metode Penelitian | 26 |
| H. Sistematika Pembahasan | 29 |

**BAB II TINJAUAN HUKUM PERADILAN TATA USAHA
NEGARA**

| | |
|-----------------------------------------------------|----|
| A. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara | 31 |
| B. Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara..... | 38 |
| C. Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara | 42 |
| D. Subjek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara..... | 50 |

**BAB III TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN GANTI RUGI
KEPADA PENGGUGAT OLEH PEJABAT TUN
DALAM PERADILAN TATAUSAHANEGARA**

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pengertian Ganti Rugi Dalam Peradilan Tata Usaha Negara.. | 56 |
| B. Lembaga Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Peradilan TUN..... | 62 |
| C. Dasar Hukum Ganti Rugi Pada Peradilan Tata Usaha Negara..... | 71 |

**BAB IV ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN GANTI RUGI
KEPADA PENGGUGAT OLEH PEJABAT TUN DALAM
PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang dan Penerapan Dibatasi Ganti Rugi Peradila Tata Usaha Negara | 77 |
| B. Bagaimana Pelaksanaan dan Tata Cara Ganti Rugi yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)..... | 93 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 99 |
| B. Saran-Saran..... | 100 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN